



EFEKTIVITAS UNICEF COUNTRY PROGRAMME 2009-2013 DALAM MEMBANTU PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI HAK ANAK PASCA PERANG SIPIL I DI CÔTE D'IVOIRE

Donata Asdar Widyawati

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by economic pressures, domestic political upheaval, and military coups which ignited the emergence of the First Civil War that occurred in 2002-2008. The civil war indirectly forced the residents of Côte d'Ivoire to take part in it and get the effects of the civil war, one of which was the abandonment of the protection of children's rights from the Côte d'Ivoire Government due to the civil war. The United Nations Children's Fund (UNICEF), as an international organization that focuses on upholding and protecting the rights of children and women, provided the *Country Programme 2009-2013* to help protect the rights of children and women in Côte d'Ivoire. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness in achieving the aid program. With the help of the concept of effectiveness and international organizations, the authors analyzed the effectiveness of the *UNICEF Country Programme 2009-2013*, which produced research findings, that *UNICEF Country Programme 2009-2013* has been effective in assisting the Côte d'Ivoire Government to fulfill, enforce and protect children's rights in Côte d'Ivoire.

Keywords: children rights, Côte d'Ivoire, UNICEF, country programme, government, effectiveness

Pendahuluan

Côte d'Ivoire (dikenal sebagai Pantai Gading) merupakan salah satu negara di wilayah Afrika Barat yang kerap mengalami konflik dalam negeri. Setelah berhasil mencapai kemerdekaan dari jajahan Perancis pada tahun 1960, Côte d'Ivoire menjadi pionir dalam stabilitas politik dan ekonomi bagi negara-negara Afrika lainnya. Di bawah kepemimpinan Houphouët-Boigny pada tahun 1960-1993, Côte d'Ivoire membina hubungan politik yang baik dengan negara-negara Barat. Dengan menjaga stabilitas lingkungan, Côte d'Ivoire mampu mengembangkan ekonominya, menarik investasi asing dan menjadi produsen kakao terbesar di dunia (Global Security, 2017).

Masih dilansir dari Global Security, setelah kematian Houphouët-Boigny pada tahun 1993, masyarakat Côte d'Ivoire berupaya untuk mendemokratisasikan negara mereka dengan cara melakukan pemilihan presiden, yang dimenangkan oleh Henri Konan Bedie. Dalam masa kepemimpinan Bedie, mulai muncul permasalahan ekonomi dan politik di Côte d'Ivoire. Harga pasar dunia untuk kopi dan kakao menurun membuat Côte d'Ivoire mengalami tekanan ekonomi. Selain itu, permasalahan politik pun muncul dikarenakan oleh adanya korupsi internal mengenai bantuan luar negeri. Hal ini memicu adanya perlawanan dari partai oposisi serta adanya kudeta militer tahun 1999. Kemudian peristiwa perlawanan

dari partai oposisi serta adanya kudeta militer inilah kemudian menjadi katalis yang menyulut perang sipil pertama pada tahun 2002-2008 (Global Security, 2017).

Konflik sosial-politik dan militer yang semakin meningkat menyebabkan runtuhnya ekonomi internal, yang secara praktis memotong perdagangan lintas batas penting dengan wilayah tetangga Afrika Barat dan secara serius menghambat kegiatan pelabuhan di Abidjan. Krisis tersebut menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan penduduk secara umum, dimana masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi 38,4 persen pada tahun 2002 dan meningkat menjadi 48,9 persen di tahun 2008 (UNICEF, 2009).

Banyaknya permasalahan serta adanya perang sipil yang melanda Côte d'Ivoire memiliki efek samping, seperti adanya 750.000 orang harus diungsikan, serta 3.000 orang terbunuh (UNICEF, 2009). Hal tersebut tentunya menyebabkan kerugian bagi warga sipil yang tidak turut serta dalam perang sipil, seperti para wanita, lansia, serta anak-anak. Berikut adalah data harapan hidup bagi anak-anak dan wanita di Côte d'Ivoire:

Tabel 1

Data Harapan Hidup bagi Anak-Anak dan Wanita di Côte d'Ivoire per tahun 2007

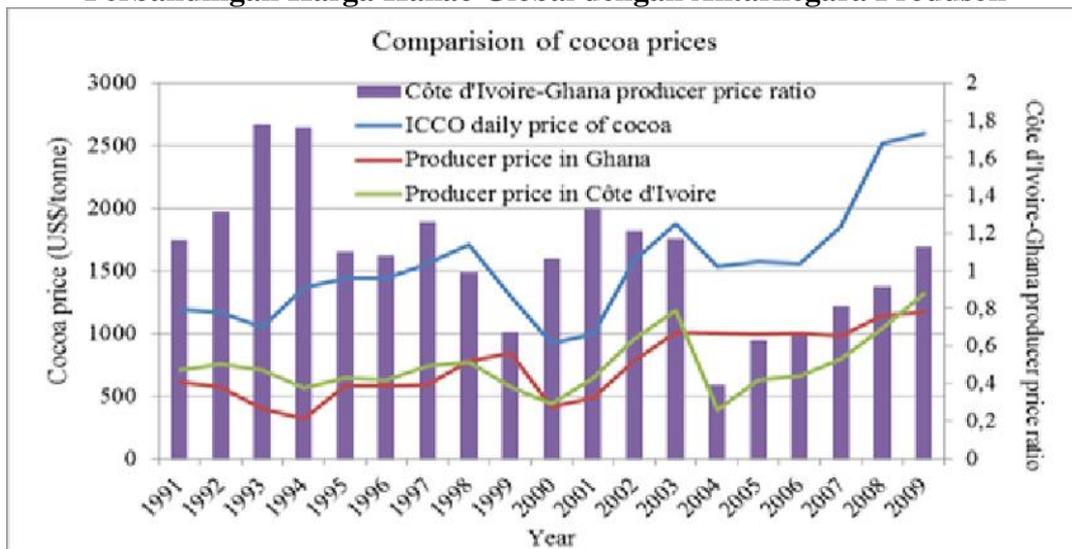
INDIKATOR DEMOGRAFIS	
Penduduk	19,262,000 jiwa
Populasi penduduk usia <5 tahun	2,872,000 jiwa
Populasi penduduk usia <18 tahun	9,271,000 jiwa
Rasio pertumbuhan penduduk (1990-2007)	2.4%
Penduduk Urban	46%
Total tingkat fertilitas (per wanita)	4.5
Usia harapan hidup (2007)	48 tahun
Rasio kehadiran sekolah dasar anak perempuan (net)	66
Tingkat kerentanan terhadap HIV	3.9
Rasio kematian bayi <1 tahun (per 1000)	89 jiwa
Rasio kematian anak <5 tahun (per 1000)	127 jiwa
Rasio kematian ibu hamil (per 100,000)	810 jiwa
Jumlah kelahiran tahunan	687,000 jiwa
Jumlah kematian anak <5 tahun	87,000 jiwa
INDIKATOR EKONOMI	
GNI per kapita	USD 910
Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata GDP per kapita	-0.7%

sumber: UNICEF Briefing Pack 2009-2013

Dengan adanya tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata GDP per kapita pada tahun 2007 yang minus, serta menjadi negara produsen kakao terbesar di dunia, Côte d'Ivoire sebenarnya memiliki sumberdaya alam yang besar. Namun Côte d'Ivoire tidak memiliki sumberdaya manusia yang memadai untuk mengolah sumberdaya alam tersebut secara maksimal, dikarenakan adanya perang sipil yang memaksa penduduk Côte d'Ivoire mau tidak mau turut serta terjun di dalamnya, serta adanya tekanan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya harga kakao di pasar dunia. Keadaan tersebut menjadikan para pemilik perkebunan kakao memilih jalan pintas, yaitu dengan mempekerjakan buruh anak.

Mempekerjakan anak sebagai buruh di perkebunan kakao tentu saja dipilih untuk menghemat biaya produksi, mengingat harga kakao di pasar dunia pada tahun 2003-2004, dimana masih terjadi perang sipil, sedang turun cukup drastis. Berikut grafik harga kakao Côte d'Ivoire terhadap pasar internasional:

Grafik 1
Perbandingan Harga Kakao Global dengan Antarnegara Produsen



Sumber: ICCO 2012, FAOSTAT

Realitas mengerikan adalah bahwa anak-anak ini, yang berusia kurang lebih 11-16 tahun (tapi terkadang ada juga yang lebih muda), dipaksa untuk melakukan keras kerja secara manual selama 80 hingga 100 jam per minggu. Mereka tidak dibayar, tidak menerima pendidikan, mendapatkan makan secara tidak layak, dan sering dipukuli dengan kejam jika mereka mencoba untuk melarikan diri. Kebanyakan tidak akan pernah melihat keluarga mereka lagi (Robbins, 2011). Awalnya, para pengelola pabrik-pabrik tersebut menjanjikan bayaran kepada mereka sebesar GBP 130 di akhir tahun pekerjaan mereka, tetapi para pengelola pabrik menyangkal bahwa uang yang akan digunakan untuk menggaji mereka telah habis untuk biaya pengobatan mereka, sehingga mereka harus bekerja 1 tahun lagi untuk bisa mendapatkan gaji mereka (Lamb, 2001).

Lebih dari 200 kasus perdagangan anak terdaftar pada tahun 2006 dan 2007. Studi Nasional tentang Pekerja Anak, yang dilaksanakan dari Agustus hingga Oktober 2005, memperkirakan bahwa 1,1% anak-anak berusia 5 hingga 17 tahun adalah korban perdagangan manusia. Hampir 45% anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak terdaftar di catatan sipil pada tahun 2006, meningkat jika dibandingkan dengan 28 persen pada tahun 2000. Alasan untuk ini termasuk isolasi dan buruknya fungsi pusat pencatatan kelahiran dan ketidaktahuan tentang kewajiban untuk mendaftarkan bagian dari populasi. Meskipun sulit untuk menentukan sejauh mana fenomena tersebut, peningkatan dalam kasus kekerasan berbasis gender telah diamati (UNICEF Cote d'Ivoire, 2009).

Banyak orang di Côte d'Ivoire mengalami kekerasan seksual atau fisik pada puncak krisis, dengan meningkatnya kasus pemerkosaan kolektif yang dilakukan oleh prajurit. Sekitar 36% wanita dewasa menderita mutilasi genital wanita. Pekerja anak memengaruhi 22,2% anak-anak berusia 5 hingga 17. Adanya urbanisasi yang cepat, pergaulan bebas, penghancuran solidaritas sosial, kemiskinan rumah tangga, serta sejumlah besar anak-anak dan remaja yang dipengaruhi oleh kurangnya prospek dalam konteks konflik dan ketidakamanan, adalah semua masalah perlindungan anak yang harus segera dicari solusinya. Selain adanya fenomena pekerja anak, dampak dari perang sipil adalah adanya malnutrisi akut yang menyerang anak-anak di Côte d'Ivoire. Malnutrisi akut menyerang 270.000 anak di bawah usia lima tahun. Memburuknya situasi gizi anak-anak dapat dikaitkan dengan ketidakamanan siklus pangan, kebiasaan makan yang buruk, dan penurunan umum sistem kesehatan, hal ini kemudian diperparah dengan keadaan masyarakat yang masih banyak buta

huruf, di mana buta huruf menjadi beban bagi para wanita, karena mereka menjadi terbatas dalam melakukan sesuatu (UNICEF Cote d'Ivoire, 2009).

Keadaan tersebut menyita perhatian tersendiri bagi United Nation Children's Fund (UNICEF). Awal mula kemunculan UNICEF dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada anak-anak secara global. PBB mendirikan UNICEF pada tanggal 11 Desember 1946 yang pada awalnya diperuntukkan menjadi sarana penyalur bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di wilayah-wilayah yang hancur akibat dari Perang Dunia II. UNICEF memiliki sejarah panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat ke seluruh dunia., baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik yang terus berlanjut sampai saat ini. Pada zaman modern ini, UNICEF memiliki misi untuk memberikan bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan dan HIV/AIDS. Melihat keadaan tersebut, UNICEF kemudian membentuk Convention on the Rights of the Child, dan diadopsi oleh United Nations General Assembly pada 20 November 1989. Konvensi ini kemudian mulai berlaku pada 2 September 1990 (Rianti, 2017).

UNICEF hadir di tengah konflik perang sipil Côte d'Ivoire dengan memberikan bantuan UNICEF Country Programme 2003-2007, namun kurangnya koordinasi dan kepemimpinan, serta mobilisasi sumber daya yang ternyata tidak mencukupi, berdampak negatif pada program. Kehadiran bantuan tersebut di tengah-tengah konflik tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2008, UNICEF menyusun rencana untuk membuat sebuah program bantuan bagi para penduduk sipil yang tidak ikut berperang, yaitu wanita dan anak-anak. Program tersebut dilakukan pada tahun 2009-2013. Program tersebut mencakup 5 komponen: (1) *Child Survival*; (2) Upaya Penanggulangan Penyebaran HIV/AIDS pada Remaja; (3) Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender; (4) Perlindungan Anak; (5) Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Lintas Sektoral (UNICEF, 2009).

Pembahasan

Analisis Efektivitas UNICEF Country Programme 2009-2013 untuk Membantu Pemerintah dalam Melindungi Hak Anak Di Côte d'Ivoire

Efektivitas *UNICEF Country Programme 2009-2013* untuk Membantu Pemerintah dalam Melindungi Hak Anak Di Côte D'ivoire diukur menggunakan enam indikator yang dikemukakan oleh S.P. Siagian (Siagian, 1987):

(1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar para implementer dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai sasaran yang terarah, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan dari program '*Child Survival*' adalah untuk mendukung kemajuan menuju pengurangan kematian anak dan ibu, peningkatan akses ke air bersih dan sanitasi, dan pertempuran HIV/AIDS dan malaria. Tujuan dari program '*HIV/AIDS dan Remaja*' adalah memberikan layanan yang tepat pada anak yatim dan anak-anak yang rentan di daerah rawan konflik, menyediakan informasi yang akurat, layanan dan pendidikan *life skills*, termasuk layanan konseling dan tes sukarela serta pengujian untuk Infeksi Menular Seks dan kesehatan reproduksi, serta adanya koordinasi program HIV dan AIDS di tingkat nasional, regional dan wilayah untuk pencegahan HIV. Tujuan dari program '*Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender*' adalah untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah (6-11 tahun) memiliki akses ke pendidikan, dan anak-anak berusia 3-5 tahun ditawarkan program pengembangan anak usia dini dan program kesiapan sekolah. Tujuan dari program '*Perlindungan Anak*' yaitu memperkuat kapasitas masyarakat, mobilisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam semua mekanisme perlindungan anak. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan dukungan teknis, demi keserasian kerangka legislatif nasional dengan standar internasional. Program ini juga mengembangkan kegiatan informasi dan komunikasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kerangka hukum nasional dan

internasional tentang perlindungan anak. Program ini melibatkan media yang lebih besar untuk promosi hak-hak anak dan perempuan yang lebih berkelanjutan.

(2) Kejelasan strategi untuk pencapaian tujuan. Strategi dibutuhkan agar para implementer tetap ada pada 'jalur' yang ditentukan dalam upaya pencapaian tujuan. Berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia, program *UNICEF Country Programme 2009-2013* didasarkan pada beberapa strategi, yaitu: (1) Memperkuat kapasitas nasional untuk perencanaan pasokan dan manajemen pelayanan dan pengembangan kebijakan-kebijakan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan wanita; (2) Komunikasi untuk pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat untuk pencapaian hasil yang baik; (3) Rehabilitasi layanan pengiriman sarana dan prasarana akan memberikan kontribusi untuk mencapai hak-hak anak di daerah bencana; melakukan advokasi dengan pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan struktural; (4) meningkatkan kerja sama dengan sektor-sektor di luar pemerintah, seperti sektor swasta, LSM, lembaga-lembaga bilateral, dan badan-badan yang berada dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNICEF Côte d'Ivoire menandatangani 48 perjanjian kemitraan, sebagai contoh, UNICEF Côte d'Ivoire memanfaatkan kemitraan dengan radio setempat untuk mengampanyekan Global End Violence. Kemitraan dengan Goethe Intitut, Save The Children, dan Kedutaan Besar Perancis dan Kanada untuk menghasilkan kampanye advokasi massal di Abidjan tentang hak anak. Kemitraan-kemitraan lainnya dilakukan dengan berbagai organisasi, seperti ILO, UNFPA, UNOCI, dan lain-lain (UNICEF, 2013).

(3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik. Hal ini berkaitan dengan kemampuan rencana kegiatan sebagai penghubung yang tepat untuk mencapai tujuan. Proses analisis dan perumusan kebijakan telah dilakukan sejak *UNICEF Country Programme 2003-2007* berakhir. Pernyataan tersebut tercantum pada *Analyse Genre du Programme de Cooperation Côte d'Ivoire - UNICEF (2003-2007): Rapport Final* yang diterbitkan pada Juni 2007, bahwa bagi UNICEF Côte d'Ivoire, se usai laporan final tersebut diterbitkan, adalah waktu yang baik untuk memulai analisis mengenai situasi dan persiapan untuk pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Côte d'Ivoire dengan *UNICEF dalam Country Programme 2009-2013*. Hal ini dilakukan segera setelah laporan final *UNICEF Country Programme 2003-2007*, karena membutuhkan adanya perumusan program dan pendanaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan *UNICEF Country Programme 2009-2013* (UNICEF, 2007).

(4) Perencanaan yang matang Perencanaan yang matang dilakukan se usai pelaksanaan proses analisis dan perumusan kebijakan. Perencanaan dilakukan bersama Pemerintah Côte d'Ivoire dan telah dilaksanakan pada Desember 2008 dalam dokumen *Programme de Cooperation Côte d'Ivoire - UNICEF 2009-2013: Plan d'Action du Programme Pays*. Perencanaan program untuk *Country Programme 2009-2013* dilakukan dengan adanya evaluasi *UNICEF Country Programme 2003-2007* yang telah berjalan, di mana program tersebut tidak terlaksana secara maksimal seperti yang direncanakan, karena terjadi krisis sosio-politik dan militer di Côte d'Ivoire (UNICEF, 2008). Krisis sosio-politik dan militer tersebut menyebabkan gangguan pasokan serta penyediaan layanan dan administrasi karena hampir diseluruh wilayah yang diberikan bantuan adalah wilayah konflik, sehingga banyak terjadi penghancuran serta penjarahan terhadap sarana dan prasarana bantuan (UNICEF, 2008).

(5) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan pencapaian tujuan. Sarana dan Prasarana tersedia dengan baik. Hal ini dikarenakan pemenuhan sarana dan prasarana tentunya juga dibantu oleh mitra-mitra yang bekerja sama dengan UNICEF Côte d'Ivoire, seperti pada sektor pendanaan dan sumber daya manusia. Adanya besaran anggaran untuk *UNICEF Country Programme 2009-2013* adalah 141.140.000 USD, 22% sumber pendanaan dari sumber reguler, dan sisanya dari sumbangan bantuan dari para mitra (UNICEF Cote d'Ivoire, 2009). Selain itu, sumber daya yang

meunjang kelancaran program adalah Côte d'Ivoire memiliki Kantor Pusat UNICEF yang terletak di Abidjan. Selain kantor pusat, UNICEF memiliki 2 kantor cabang yang berbasis di Man dan Bouaké dan memiliki 102 staf internal (UNICEF, 2009).

(6) Adanya sistem pengawasan dan pengendalian dalam implementasi rencana kegiatan. UNICEF menyediakan proses pengawasan sistem informasi. Sistem rutin dan survei khusus telah menghasilkan data yang lebih terpilah berdasarkan wilayah, gender, tingkat ekonomi, yang telah memungkinkan analisis lebih lanjut untuk dapat berkontribusi pada peningkatan perencanaan Pemerintah Côte d'Ivoire. terlampir contoh data-data terpilah yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan terhadap masyarakat setempat. Selain pengawasan yang dilakukan oleh UNICEF, pengawasan dan pengendalian juga dilakukan oleh Pemerintah Côte d'Ivoire pada pelaksanaan kegiatan, karena berjalannya program butuh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Côte d'Ivoire agar kerja sama yang terjalin antara UNICEF dengan Pemerintah Côte d'Ivoire tetap dapat berjalan bersama tanpa keluar dari tujuan awal pemberian program bantuan, yaitu pengembangan pelaksanaan prioritas nasional dalam rencana pembangunan nasional.

Peran UNICEF Sebagai Organisasi Internasional yang Bekerja Sesuai dengan Konsep Organisasi Internasional di Côte d'Ivoire

Munculnya konsep organisasi internasional berawal dari pemikiran kaum liberalis. Liberalisme sendiri sangat memperhitungkan eksistensi dari aktor non-state, seperti organisasi internasional. Liberalisme menganggap bahwa organisasi internasional dapat menjadi media untuk membangun struktur terhadap relasi antar negara serta memberikan solusi atas dilemma of strategic interaction (Martin, 1992). Organisasi internasional memiliki peran dan fungsi, seperti (Abbot & Snidal, 1998):

(1) Menyediakan aliran informasi dan memfasilitasi interaksi. Dalam hal ini, UNICEF hadir sebagai wadah untuk mewakili interaksi tersebut, dimana UNICEF secara khusus berkonsentrasi pada upaya memperluas hak-hak anak yang kurang diperhatikan yang hidup di negara-negara berkembang. Di Côte d'Ivoire, UNICEF memfasilitasi interaksi antara pemerintah setempat, masyarakat, serta masyarakat internasional melalui pelaksanaan program-program bantuan serta publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh UNICEF dalam website mereka. Dengan hal tersebut, masyarakat di luar Côte d'Ivoire menjadi tahu apa yang terjadi di negara tersebut, dan masyarakat Côte d'Ivoire menerima dampak positif keberadaan UNICEF berupa bantuan-bantuan pembangunan dan untuk memperjuangkan hak-hak anak yang kurang diperhatikan.

(2) Menyelesaikan sengketa dan mengelola konflik. Selama terjadinya ketegangan sipil yang terjadi di Côte d'Ivoire, UNICEF membantu Pemerintah untuk mengelola konflik dengan cara membantu memberikan program-program *UNICEF Country Programme 2009-2013* yang bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian MDGs dan realisasi dari hak-hak untuk kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi anak-anak dan perempuan dalam konteks pasca-krisis perdamaian dan rekonstruksi (UNICEF, 2008). Tujuan dari adanya *UNICEF Country Programme 2009-2013* di Côte d'Ivoire menunjukkan bahwa UNICEF mengelola konflik dengan cara membantu Pemerintah untuk merealisasikan hak-hak dalam masa pasca-krisis.

(3) Melakukan kegiatan operasional dan bantuan teknis. UNICEF melakukan kegiatan dengan memberikan bantuan-bantuan kepada Côte d'Ivoire berupa kegiatan operasional seperti bantuan teknis, seperti contohnya adalah *UNICEF Country Programme 2009-2013* yang penulis bahas pada bab III subbab 3.2 ini. UNICEF Country Programme 2009-2013 yang telah dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan adanya *Country Programme 2017-2020*. *Country Programme 2017-2020* merupakan program WFP (*World*

Food Programme) yang bekerja sama UNICEF dengan FAO (*Food and Agriculture Organizations*).

(4) Membentuk wacana internasional, serta fungsi-fungsi lain yang membantu mengurangi biaya interaksi antar negara. Dengan adanya bantuan-bantuan yang disalurkan melalui program UNICEF, dapat mengurangi biaya interaksi antar negara, dengan langsung menyalurkan bantuan kepada lembaga bantuan yang memiliki konsentrasi khusus, seperti UNICEF. Hal tersebut dikarenakan negara-negara tidak perlu melakukan pertemuan-pertemuan guna membicarakan suatu permasalahan tertentu pada suatu pertemuan atau kongres di suatu negara, dimana penyelenggaraan pertemuan antar negara seperti itu tentunya membutuhkan biaya penyelenggaraan yang tidak sedikit. Melalui UNICEF, negara-negara tidak perlu melakukan pertemuan antar negara yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan bisa langsung menjadi donor bagi program-program UNICEF.

Kesimpulan

Masuknya pemberian bantuan *UNICEF Country Programme* ini dilatar belakangi oleh adanya konflik domestik di Côte d'Ivoire, yaitu adanya perang sipil yang terjadi akibat adanya permasalahan-permasalahan ekonomi, politik, dan kudeta militer yang menjadi pemicu perang sipil tersebut. Melihat fenomena UNICEF kemudian memberikan bantuan. Pemberian bantuan berupa *UNICEF Country Programme* yang pertama diberikan pada periode tahun 2003-2007. Pemberian bantuan tersebut tidak berjalan sesuai rencana, karena banyaknya permasalahan saat pelaksanaan program, salah satunya dikarenakan oleh masih berlangsungnya perang sipil.

Seusai perang sipil selesai pada 2008, UNICEF memberikan bantuan lanjutan, yaitu *Country Programme 2009-2013*. UNICEF *Country Programme 2009-2013* telah direncanakan sejak tahun 2007, seusai UNICEF *Country Programme 2003-2007*. Perencanaan *UNICEF Country Programme 2009-2013* berkaca pada evaluasi-evaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada *UNICEF Country Programme 2003-2007*.

Hasilnya, bantuan dari UNICEF untuk Côte d'Ivoire berupa *UNICEF Country Programme 2009-2013* ini berjalan sesuai dengan harapan. Program ini berjalan dengan efektif, karena program ini sudah sesuai dengan indikator-indikator efektivitas yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis penelitian tersebut. Berjalannya *UNICEF Country Programme 2009-2013* juga mencerminkan UNICEF sebagai organisasi internasional, karena UNICEF menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional dengan memberikan bantuan tersebut.

Referensi

- Abbot, K. W., & Snidal, D. (1998). Why States Act through Formal International. *The Journal of Conflict Resolution Vol. 42, No. 1*, 3-32.
- Global Security. (2017). *Ivory Coast Conflict*. Diambil kembali dari GlobalSecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast.htm>
- Lamb, C. (2001, April 22). *The Child Slaves of the Ivory Coast-bought and sold little as GBP40*. Diambil kembali dari The Telegraph: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/CôtedIvoire/1317006/The-child-slaves-of-the-Ivory-Coast-bought-and-sold-for-as-little-as-40.html>
- Martin, L. L. (1992). Interests, Power, and Multilateralism. *International Organization, Vol. 46, No. 4 (Autumn, 1992)*, 765-792.
- Rianti, W. (2017). *FUNGSI UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI AFRICA SELATAN*. Diambil kembali dari e-Skripsi Universitas Andalas: <http://scholar.unand.ac.id/31005/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

- Robbins, J. (2011, November 17). Diambil kembali dari The Huffington Post:
http://www.huffingtonpost.com/john-robbins/is-there-child-slavery-in_b_737737.html
- Siagian, S. P. (1987). *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- UNICEF. (2007). *Analyse Genre du Programme de Cooperation Cote d'Ivoire - UNICEF (2003-2007): Rapport Final*. Abidjan: UNICEF.
- UNICEF. (2008). *Programme de Cooperation Côte d'Ivoire – UNICEF 2009-2013: Plan d'Action du Programme Pays*. Abidjan: UNICEF Cote d'Ivoire.
- UNICEF. (2009). Diambil kembali dari
https://www.unicef.org/cotedivoire/UNICEF_Briefing_Pack_2009_2013_En.pdf
- UNICEF. (2013). *UNICEF Annual Report 2013 – Cote d'Ivoire*. Abidjan: UNICEF.
- UNICEF Cote d'Ivoire. (2009). *Cote d'Ivoire Country Programme Document 2009-2013*.